

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasca berakhirnya perang dunia kedua, dalam agenda menunjukkan masing-masing kekuatan suatu negara mulai beralih dari cara yang represif menjadi cara yang persuasif. Konsep ini diperkenalkan pertama kali oleh Joseph Nye dengan sebutan *soft power*. Dalam tulisannya, Nye (2004) menyebutkan terdapat 3 pilar utama *soft power*: budaya (*culture*), nilai politik (*political value*), dan kebijakan luar negeri (*foreign policy*) (Nye, 2004). *Soft power* dipandang Tiongkok sebagai unsur yang fundamental dalam membentuk kekuatan nasional yang utuh dan terstruktur yang mencakup kekuatan politik, ekonomi, dan militer. Bagi Tiongkok, pengembangan soft power sangat penting untuk menciptakan model politik dan kebijakan Tiongkok yang mudah untuk diterima dan dimengerti oleh dunia serta membuka kesempatan bagi Tiongkok untuk memenangkan persahabatan dengan negara lain yang dapat membantu Tiongkok mencapai kepentingan nasionalnya (Linda, 2010). Salah satu bentuk implementasi soft power yang kerap digunakan oleh negara adalah diplomasi budaya. Diplomasi budaya merupakan kegiatan bertukar ide, informasi, seni, dan aspek budaya lainnya kepada masyarakat negara lain dengan tujuan membangun rasa saling memahami (Cummings, 2003). Dalam mengimplementasi diplomasi budaya, ada banyak berbagai kegiatan yang dilakukan oleh negara untuk menyampaikan identitas dan penyebaran budaya nasionalnya ke negara lain. Kegiatan tersebut dapat berupa pertunjukkan seni, mempromosikan bahasa nasional ke negara lain melalui lembaga bahasa, pertukaran akademisi dan sebagainya (Patjinka, 2014).

Sejak reformasi keterbukaan Tiongkok pada dunia tahun 1978 dilakukan, Tiongkok terus bangkit menjadi kekuatan perekonomian baru dunia yang mampu menyaingi dominasi kekuatan Amerika Serikat. Bank Dunia mencatat, dari tahun 1978 hingga 2007 pertumbuhan ekonomi Tiongkok setidaknya meningkat 9,8% lebih cepat 6,8% dari tingkat pertumbuhan ekonomi dunia. Dapat ditarik kesimpulan, Tiongkok telah mengalami pertumbuhan ekonomi sebanyak 14 kali lipat (Patjinka, 2014). Meski bagi Tiongkok pertumbuhan ekonomi yang sangat

pesat memberikan dampak positif bagi Tiongkok, di mata negara lain terutama Amerika Serikat muncul pandangan dan pendapat negatif mengenai kebangkitan kekuatan Tiongkok di ranah internasional. Amerika Serikat sebagai negara yang menjadi dominasi utama kekuatan politik dan ekonomi dunia tentu merasa terancam dengan kehadiran kekuatan baru dari Tiongkok hingga menciptakan kondisi yang dinamakan “*China Threat Theory*”. Alasan utama yang menyebabkan Tiongkok dipandang buruk oleh negara-negara barat utamanya Amerika Serikat adalah perbedaan ideologi dan budaya serta faktor geoekonomi dan geopolitik (Xia, n.d). Tiongkok sebagai negara penganut ideologi komunisme, mengingatkan Amerika Serikat pada histori perang dingin melalui ideologi dengan Uni Soviet. Dengan pertumbuhan Tiongkok yang sangat cepat, Amerika Serikat khawatir persebaran komunisme di dunia juga berkembang secara cepat. Ditambah dengan besarnya wilayah, banyaknya jumlah penduduk, serta pertumbuhan ekonomi yang melaju semakin mendorong kesempatan Tiongkok untuk menjadi pengaruh bagi perekonomian negara-negara lain (Xia, n.d). Melihat besarnya pandangan dunia internasional terhadap negaranya, Tiongkok melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan kepercayaan publik global sehingga dapat memudahkan penyebaran pengaruhnya di dunia internasional melalui kegiatan diplomasi.

Dalam melawan persepsi negatif yang diciptakan negara-negara barat terhadap Tiongkok, perlu adanya upaya pendekatan terhadap publik untuk menciptakan citra positif dan kepercayaan di kalangan publik salah satunya melalui budaya. Diplomasi budaya sangat penting bagi Tiongkok untuk mempengaruhi kebijakan negara asing agar sesuai dengan kepentingan dan tujuan strategis jangka panjang Tiongkok (Xia, n.d). Hal ini juga sejalan dengan rencana strategis Tiongkok di setiap rapat pleno Partai Komunis Tiongkok yang selalu mengedepankan pengembangan budaya.

“Kita harus berpegang teguh pada orientasi budaya sosialis yang berkembang, membawa kemajuan budaya sosialis pada kebangkitan baru, mendorong kreativitas bangsa, dan meningkatkan budaya sebagai soft power negara kita untuk lebih menjamin hak dan kepentingan budaya rakyat demi memperkaya kehidupan budaya masyarakat Tiongkok (Chinese Communist Party, 2007).”

Sumber: Laporan Hu Jintao pada Kongres Nasional PKT ke 17, pada 15 Oktober 2007.

“Budaya merupakan jantung bagi suatu negara dan memberi rasa kepemilikan pada rakyatnya. Untuk menyelesaikan pembangunan masyarakat yang sejahtera dalam segala bidang dan mencapai kebangkitan besar bagi Tiongkok, kita harus menciptakan strategi baru dalam mempromosikan budaya sosialis dan mewujudkan perkembangan dengan meningkatkan soft power Tiongkok dan memadukan tren sosial dengan budaya untuk mendorong pembangunan”

“Kekuatan dan daya saing internasional budaya Tiongkok menjadi indikator penting bagi pengembangan kekuatan dan kemakmuran bangsa Tiongkok. Kita harus mendorong pembangunan yang pesat dan kemajuan secara menyeluruh pada industri dan layanan budaya serta memastikan berdampak juga pada sosial dan ekonomi. Kita harus mendorong pengembangan filsafat dan ilmu sosial, radio, televisi dan film, pers dan penerbitan, serta sastra dan seni. Kita harus menciptakan lebih banyak program budaya publik dengan skala besar, dan meningkatkan sistem layanan budaya publik yang lebih efisien. Kita juga harus mendorong integrasi budaya dengan sains dan teknologi, mengembangkan bentuk operasi budaya yang baru, dan memperluas operasi budaya. Kita harus mendorong pengembangan jaringan komunikasi modern untuk meningkatkan kapasitas komunikasi kita. Kita harus memperkuat lembaga budaya nirlaba milik negara, meningkatkan tata kelola perusahaan entitas budaya yang berorientasi profit, dan menciptakan pasar budaya dengan daya saing internasional. Kita harus membuka sektor budaya lebih luas kepada dunia internasional dan mencontoh pencapaian budaya negara lain. Kita harus menciptakan lingkungan yang baik yang memungkinkan banyak tokoh budaya berbakat, terutama tokoh budaya terkemuka dan perwakilan budaya Tiongkok, untuk menonjolkan diri dalam seni. Kita harus memberikan penghargaan kepada tokoh budaya dengan kontribusi luar biasa.” (Kedutaan Besar Tiongkok untuk India, 2012)

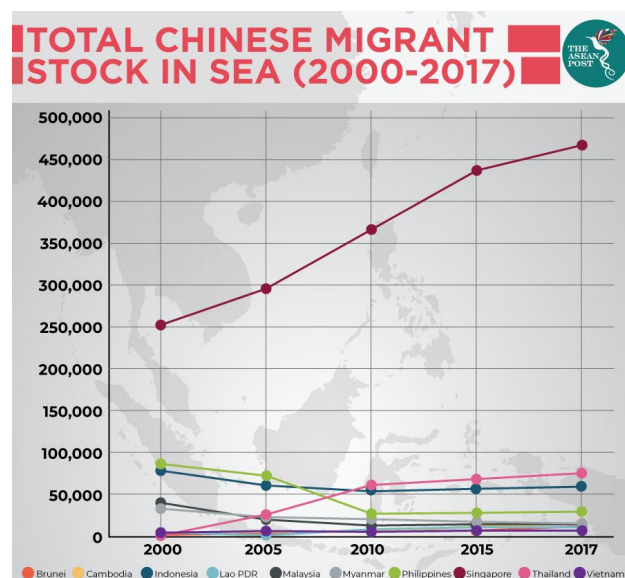
Sumber: Laporan Hu Jintao pada Kongres Nasional PKT ke 18, pada 12 Desember 2012.

Pada masa kepemimpinan Hu Jintao, Tiongkok proaktif tidak hanya pada bidang ekonomi, politik, dan keamanan internasional tetapi juga pada *soft power*. Diplomasi budaya telah menjadi salah satu agenda utama pada kebijakan luar negeri yang diluncurkan oleh Hu Jintao yakni *Peaceful Development* dan *Harmonious World*. *Peaceful Development* (和平发展, *héping fāzhǎn*) merupakan salah satu pilar kebijakan luar negeri Tiongkok pada masa pemerintahan Hu Jintao yang bermakna menciptakan Tiongkok menjadi negara yang menjunjung tinggi

perdamaian dunia dan terbuka dengan negara lain sehingga dapat mendorong terjadinya hubungan kerjasama dengan negara lain guna membangun dunia yang harmonis, damai abadi, dan sejahtera (The State Council The People's Republic of China, 2011). Lebih lanjut, *peaceful development* bertujuan menciptakan hubungan kerjasama regional dan “hubungan tetangga” yang baik, saling percaya, dan menguntungkan (Danner, 2018). Sedangkan *harmonious world* (和谐世界, *héxié shìjiè*) bermakna menghormati hak setiap negara dalam memilih sistem politik sosial dan jalur pembangunannya sendiri, mendorong budaya untuk saling melengkapi melalui persaingan dan perbandingan sebagai tanda keragaman peradaban serta mempromosikan hubungan internasional yang lebih demokratis dan bersama membangun dunia yang harmonis dimana masyarakat dapat hidup dengan damai dan saling menghormati (Danner, 2018). Dapat disimpulkan, dua pilar kebijakan tersebut yang mendorong Tiongkok untuk lebih terbuka dengan negara lain sehingga dapat menciptakan hubungan diplomasi dan kerjasama dengan negara lain guna memperluas pengaruh Tiongkok di dunia internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, Hu Jintao memanifestasikannya dalam bentuk diplomasi budaya untuk membentuk daya 4egat dan citra positif Tiongkok di mata dunia (ROSYIDI, 2021).

Dengan budaya, ketegangan politik dan prasangka buruk terhadap negara lain bisa diatasi serta terciptanya rasa hormat satu sama lain. Budaya menciptakan pengalaman yang berkesan sedangkan diplomasi menciptakan hubungan kerjasama dari luar negeri sehingga diplomasi budaya dapat menciptakan kepercayaan publik global untuk mendukung kebijakan-kebijakan luar negeri dari negara asing (Kedutaan Besar Tiongkok untuk India, 2012). Dalam mengupayakan penyebaran *soft power* secara global, Tiongkok memilih kawasan Asia Pasifik khususnya Asia Tenggara melalui ASEAN untuk menjadi mitra strategis Tiongkok dalam melaksanakan diplomasi budaya. Bagi masyarakat negara-negara anggota ASEAN, menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok sangat penting dan dijaga guna mempertahankan kestabilan perekonomian ASEAN mengingat perekonomian ASEAN cukup bergantung pada Tiongkok. Besarnya populasi orang Tionghoa di Asia Tenggara memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sejarah, budaya, dan ekonomi wilayah Asia Tenggara. Hal ini tentu dimanfaatkan Tiongkok untuk

memperkuat keterlibatannya dengan komunitas tionghoa di Asia Tenggara melalui diplomasi budaya (Phu, 2021). Banyaknya masyarakat Tionghok yang berhasil menjadi pengusaha dan pedagang yang sukses menjadi peluang bagi Tionghok dalam mempromosikan diplomasi budayanya. Menurut laporan Divisi Populasi PBB, pada tahun 2015 angka individu Tionghok yang tinggal di luar negeri meningkat sebanyak dua kali lipat hingga menyentuh angka 9,5 juta. Faktor pendorong lainnya adalah ambisi Tionghok dalam menjalankan program *Belt and Road Initiative* (BRI), dimana program ini Tionghok melakukan investasi di negara-negara anggota ASEAN mendorong gelombang pekerja Tionghok untuk bekerja di negara-negara tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap program BRI (The ASEAN Post Team, 2018). Selain faktor ekonomi, letak geografis juga menjadi faktor utama Tionghok memilih ASEAN dalam menjalin diplomasi budaya untuk mencapai kepentingan geopolitik Tionghok. Dari segi daratan, Tionghok (Provinsi Yunnan dan Guanxi) berbatasan langsung dengan Myanmar, Vietnam, dan Laos, sedangkan dari wilayah Laut Cina Selatan, Tionghok berbatasan langsung dengan Indonesia, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam (Phu, 2021). Jejak sejarah yang ditinggalkan oleh Tionghok di kawasan Asia Tenggara semakin mendukung situasi Tionghok dalam meningkatkan soft power di kawasan tersebut (Phu, 2021).



Gambar 1.1 Total imigran Tionghok di Asia Tenggara tahun 2000-2017

Sumber: www.mytoshiblog.com

Ketertarikan Tiongkok menjalin hubungan diplomatik secara khusus dengan ASEAN ditandai dengan kehadiran Menteri Luar Negeri Tiongkok, Qian Qichen pada upacara pembukaan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-24 tahun 1991 (Phu, 2021). Kemudian pada tahun 2003, secara resmi Tiongkok menyetujui perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara dan membentuk kemitraan strategis Tiongkok-ASEAN (Xijun, 2021). Tiongkok dan ASEAN secara resmi menjalin kerjasama di bidang budaya pada tahun 2005 ditandai dengan penandatanganan *ASEAN-China Memorandum of Understanding on Cultural Cooperation* di Bangkok (Xijun, 2021). Melalui nota kesepahaman ini, Tiongkok dan ASEAN berkomitmen meningkatkan kerjasama kebudayaan melalui kolaborasi dan pertukaran seni, penelitian dan studi bersama, pertukaran informasi serta pertukaran dan interaksi antar masyarakat (ASEAN, 2005). Setahun setelah penandatanganan perjanjian tersebut, Tiongkok secara resmi memulai upaya diplomasi budaya pertamanya dengan mendirikan lembaga bahasa mandarin yang dinamakan Confucius Institute di Thailand dan Filipina (Shuto, 2018). Kerjasama ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya dan berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, seni, dan pertukaran antara kedua pihak.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan studi banding melalui penelitian terdahulu untuk menemukan celah penelitian. Pertama, pada penelitian Agis Anindia yang berjudul “DIPLOMASI BUDAYA KOREA SELATAN MELALUI KOREAN CULTURAL CENTER DALAM PROGRAM HANBOK EXPERIENCE” dimana penulisnya meneliti upaya diplomasi budaya yang dilakukan oleh Korea Selatan di Indonesia melalui program *hanbok experience* yang memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia mengenai baju tradisional Korea Selatan. Kedua, pada penelitian Yanti Nianti yang berjudul “Analisis Implementasi Diplomasi Budaya Tiongkok Melalui Confucius Institute di Indonesia Tahun 2014-2020” menjelaskan bentuk diplomasi budaya yang dilakukan Tiongkok di Indonesia adalah dengan menyediakan pembelajaran Bahasa mandarin bagi warga Indonesia yang ingin belajar Bahasa mandarin langsung di Tiongkok dimana program ini membantu para warga Indonesia selain keturunan Tionghoa untuk menjadi penerjemah Bahasa mandarin. Ketiga, pada penelitian Ali Noer Zaman, Cecep Effendi, Wachid Ridwan, Reza Fahlevi yang

berjudul “Diplomasi Budaya Indonesia ke Thailand” menjelaskan bagaimana Indonesia menggunakan makanan khas Indonesia dan Bahasa Indonesia sebagai 7 egative77 diplomasi budaya di Thailand sehingga masyarakat Thailand dapat mengenali makanan khas Indonesia dan Bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia.

Dari ketiga penelitian terdahulu yang telah dipaparkan secara singkat, penulis menemukan kesamaan yakni fokus penelitiannya Negara-negara tersebut menggunakan diplomasi budaya sebagai salah satu upaya dalam menjalin kerjasama dengan negara lain untuk saling memberikan pengaruh satu sama lain di negaranya masing-masing dalam bentuk pertukaran budaya (melalui Bahasa, makanan, dan pakaian tradisional). Disinilah memunculkan celah yang belum menjadi fokus penelitian dari ketiga penelitian terdahulu. Penulis melihat bahwa ketiga penelitian di atas cenderung membahas mengenai diplomasi yang ditargetkan untuk satu negara sehingga ini menjadi celah bagi penulis untuk meneliti bagaimana suatu negara berupaya menyebarkan pengaruhnya dengan menggunakan metode diplomasi melalui organisasi regional suatu kawasan. Pada konteks penelitian ini, penulis ingin menganalisis bagaimana kehadiran ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara menjadi peluang bagi Tiongkok untuk menyebarkan soft powernya melalui diplomasi budaya yang bertujuan menghindari dan menghapus citra buruk Tiongkok yang telah diciptakan oleh negara-negara barat serta menjadi “teman baik” bagi negara-negara anggota ASEAN.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, penulis memberikan batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut. **Bagaimana upaya diplomasi budaya Tiongkok terhadap ASEAN pada tahun 2002–2012?**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Penelitian ini secara umum dilakukan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar S1 dari program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu

Sosial, Budaya, dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan ilmu hubungan internasional dengan fokus diplomasi agar bisa menjadi ilmu dan pembahasan baru untuk masyarakat luas khususnya bagi para masyarakat yang secara spesifik mempelajari ilmu hubungan internasional.

1.3.2 Secara Khusus

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana upaya diplomasi budaya pertama Tiongkok terhadap ASEAN. Selain itu, Tiongkok juga berupaya untuk menandingi pengaruh barat yang masih mendominasi negara-negara ASEAN dengan menunjukkan diri sebagai “teman baik” bagi negara-negara ASEAN yang dapat mendorong terciptanya hubungan kerjasama dalam jangka panjang serta meningkatkan kepercayaan publik ASEAN terhadap kebijakan-kebijakan Tiongkok agar pengaruh Tiongkok di ASEAN dapat diterima dengan baik oleh masyarakatnya.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 *Soft Power*

Munculnya konsep *soft power* di awal tahun 1980-an merupakan pergeseran pola kekuasaan dunia internasional pasca perang dingin yang diperkenalkan oleh Joseph Nye dan dikembangkan pertama kali oleh Amerika Serikat. Joseph Nye membagi *power* menjadi 2 jenis, *hard* dan *soft*. Menurut Nye (2004), *soft power* berkaitan dengan kemampuan membentuk preferensi orang lain, sedangkan *hard power* adalah kemampuan dalam mencapai suatu tujuan dengan cara koersif atau paksaan (Nye, 2004). Lebih lanjut, dalam bukunya yang berjudul “*Soft Power: The Key to Success in International Politics*” (2004), *soft power* adalah kemampuan suatu negara atau organisasi untuk mempengaruhi perilaku orang lain yang bertujuan mendapatkan hasil yang diinginkan atau dengan kata lain mempengaruhi tanpa memaksa (Nye, 2004). Terdapat 3 unsur yang menjadi landasan *soft power*, yakni sistem nilai politik (*political value*), budaya (*culture*), dan kebijakan luar negeri (*foreign policy*). *Soft power* juga dapat dikatakan sebagai strategi untuk menghindari cara berpolitik tradisional yang selalu menggunakan unsur paksaan (McClory, 2015). Ketika negara mampu untuk menarik dan mempengaruhi negara

lain dengan nilai dan praktik yang dilakukannya maka negara tersebut dianggap memiliki *soft power* yang efektif (Raimzhanova, 2018).

Luasnya definisi *soft power* oleh Joseph Nye, menciptakan beragam definisi baru dari beberapa ahli lainnya. Jonathan McClory mengembangkan definisi *soft power* dari Nye sebagai strategi melakukan pendekatan ke negara lain tanpa paksaan, melainkan dengan membangun koneksi dan koalisi, mengembangkan narasi yang menarik, menetapkan norma-norma internasional, dan memanfaatkan sumber daya negara yang unggul sehingga dapat menarik di mata negara lain (McClory, 2015). McClory juga mengembangkan 3 pilar utama *soft power* Nye menjadi 5 pilar, pemerintahan (*government*), budaya (*culture*), diplomasi (*diplomacy*), pendidikan (*education*), dan bisnis/inovasi (*business/innovation*) (McClory, 2015). Menurut beberapa ahli, seperti Bonnie S. Glaser dan Melissa E. Murphy (2009) menyatakan, bahwa budaya menjadi pilar utama *soft power* Tiongkok sebagai bentuk perlawanan “*China Treat*” yang dikenalkan oleh Amerika Serikat karena khawatir akan pesatnya perkembangan kekuatan Tiongkok (Glaser & Murphy, 2009).

1.4.1.1 Diplomasi Budaya

Secara harfiah, budaya berkaitan erat dengan sesuatu yang terlihat seperti seni dan literatur. Perubahan pola politik internasional membawa arah baru bagi praktik diplomasi suatu negara. Diplomasi budaya adalah salah satu bentuk aktivitas *soft power* yang dilakukan oleh para aktor negara maupun non negara pada era kontemporer. Menurut UNESCO dalam konteks diplomasi, budaya adalah seperangkat ciri-ciri spiritual, material, intelektual, dan emosional khas dari masyarakat atau suatu kelompok sosial yang terdiri dari seni dan sastra, gaya hidup, cara hidup bersama, sistem nilai, tradisi, dan kepercayaan (UNESCO, 2002). Definisi diplomasi budaya sendiri sangat beragam di antara para cendekiawan diplomasi. Nicholas J. Cull, pakar yang mempopulerkan teori diplomasi menyatakan diplomasi budaya merupakan komponen dari diplomasi publik yang kemudian definisinya dikembangkan menjadi upaya untuk mempengaruhi lingkungan internasional dengan nilai-nilai kebudayaan negaranya yang bertujuan untuk dikenal oleh publik global (Cull, 2009). Milton C. Cummings salah satu tokoh yang turut mempopulerkan istilah diplomasi budaya, mendefinisikannya

sebagai pertukaran ide, informasi, seni, dan aspek-aspek budaya lainnya diantara bangsa-bangsa dan masyarakatnya dalam rangka menciptakan rasa saling pengertian atau pemahaman yang lebih baik (Cummings, 2003). Adapun tokoh lain yang turut mendefinisikan diplomasi budaya, seperti Hubinger (2006) yang menyatakan diplomasi budaya merupakan satu media penting kebijakan luar negeri suatu negara yang berkaitan dengan presentasi, promosi, dan pembangunan citra positif negara melalui aktivitas yang melibatkan unsur budaya (Hubinger, 2006).

Dapat dikatakan diplomasi budaya berkaitan erat dengan *soft power* karena diplomasi budaya dilakukan dengan cara menarik perhatian negara lain menggunakan pendekatan kebudayaan sebagai alat utama untuk menjalankan proses diplomasi (Bestari, 2022). Selain itu secara praktiknya, diplomasi budaya juga termasuk dalam diplomasi publik karena diplomasi ini ditujukan secara langsung kepada publik di luar negeri (Wijaya, 2022). Diplomasi budaya dapat dilakukan aktor non negara, seperti lembaga non-pemerintahan, sekelompok masyarakat, serta masyarakat individu. Keterlibatan pihak swasta pada proses diplomasi budaya menjadi komponen yang penting karena pihak swasta dapat berperan sebagai mitra untuk menyediakan dan memproduksi produk, layanan, kontak, serta keahlian yang dibutuhkan dalam menjangkau level internasional (Smith S, 2016). Dalam melakukan diplomasi budaya, pada umumnya negara akan menggunakan kesenian, pariwisata, olahraga, pendidikan, teknologi, penukaran ahli, dan sebagainya sebagai materi diplomasinya (Zahidi, 2016).

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep diplomasi budaya menurut John Lenczowski. Lenczowski mendefinisikan diplomasi budaya sebagai penggunaan berbagai unsur atau instrumen budaya untuk mempengaruhi publik asing, pembuat opini, dan bahkan pemimpin asing (Lenczowski, 2009). Lenczowski menegaskan ini bukan bentuk propaganda keras, melainkan upaya untuk membangun kepercayaan dan pemahaman jangka panjang. Lenczowski menjelaskan diplomasi budaya dirancang untuk mempengaruhi opini publik asing agar tercipta pandangan positif terhadap kebijakan, penduduk, dan budaya suatu negara (Lenczowski, 2009). Lebih lanjut Lenczowski menjelaskan, dengan instrumen-instrumen tersebut dimanfaatkan pada diplomasi budaya untuk menciptakan pandangan positif terhadap negara tersebut, mendorong kerjasama

yang lebih besar dengan negara lain, membawa perubahan politik atau budaya di negara lain, serta mengurangi, mencegah, mengelola, dan mengatasi konflik dengan negara lain (Lenczowski, 2009). Lenczowski menyebutkan beberapa instrumen yang digunakan dalam melakukan upaya diplomasi budaya:

1. Pendidikan

Penggunaan pendidikan sebagai 11egative1111 diplomasi budaya dapat dilakukan dalam bentuk program pertukaran pelajar antar negara dan konferensi internasional atau pekan pendidikan, serta penyediaan beasiswa terhadap pelajar asing yang bertujuan memberikan kesempatan bagi pelajar asing belajar di suatu negara, menjadi media pelajar asing mempelajari kebudayaan dari negara tersebut serta mendorong terjadinya kerjasama antar universitas.

2. *Languange Teaching*

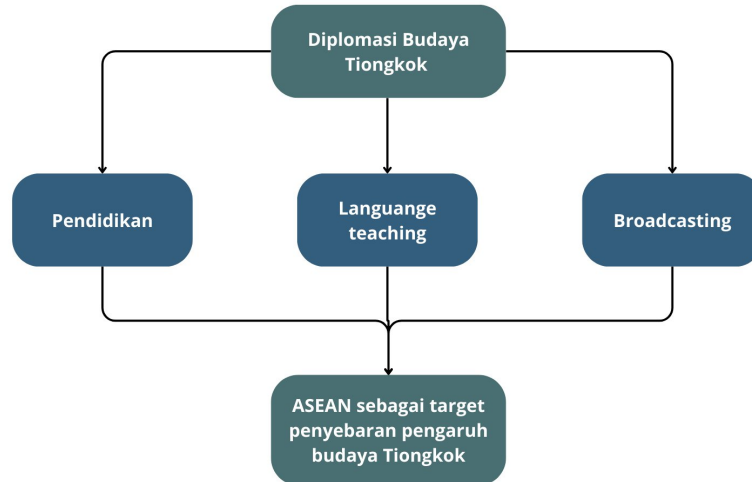
Languange teaching atau pengajaran Bahasa dalam diplomasi budaya dapat dilakukan dengan mengirimkan tenaga ahli Bahasa negara tersebut untuk mengajarkan bahasanya ke negara lain, baik itu ke sekolah-sekolah maupun universitas. Selain itu, pengajaran Bahasa juga dapat dilakukan dengan mendirikan lembaga Bahasa di negara lain. Pengajaran Bahasa bertujuan untuk memberikan akses atau memfasilitasi 11egati global dalam mengenal 11egative1111 suatu negara, informasi, ide, maupun pesan yang ingin disampaikan negara tersebut kepada dunia global.

3. *Broadcasting*

Penyiaran melalui media seperti radio, tv, film, berita bertujuan untuk menyampaikan informasi dan ide suatu negara secara terang-terangan kepada 11egati asing sehingga opini terhadap suatu negara dapat diciptakan langsung oleh 11egati asing itu sendiri.

1.5 Sintesa Pemikiran

Gambar 1.2 Sintesa Pemikiran



Sumber: Penulis

Berdasarkan penjabaran latar belakang dan kerangka pemikiran diatas, maka terbentuklah sintesa pemikiran sebagai berikut. Pada masa kepemimpinan Hu Jintao, Tiongkok secara aktif mengedepankan soft powernya untuk menciptakan citra positif di mata dunia dan dapat menyebarkan pengaruhnya ke negara tetangga yang dimanifestasikan dalam bentuk diplomasi budaya. Dalam menganalisis upaya diplomasi budaya yang dilakukan Tiongkok terhadap ASEAN, akan ditinjau melalui 3 instrumen berdasarkan konsep yang digagas oleh John Lenczowski (2009), yakni pendidikan, *language teaching*, dan *broadcasting*.

Dalam konteks diplomasi budaya, pendidikan digunakan dalam bentuk penyelenggaraan pekan pendidikan berbasis internasional guna mendorong terjadinya kerjasama antar universitas yang bertujuan meningkatkan minat para mahasiswa untuk melakukan pertukaran mahasiswa, penelitian bersama, hingga perencanaan dan pembentukan segala bentuk program kerjasama yang menghasilkan riset dan pengembangan kualitas universitas suatu negara.

Dalam konteks diplomasi budaya, *language teaching* dilakukan dalam bentuk pendirian lembaga Bahasa dengan tujuan memfasilitasi pembelajaran Bahasa mandarin bagi 12egati asing serta media bagi Tiongkok memperkenalkan

13egative1313, nilai dan sejarah kebudayaannya sehingga dapat menciptakan minat dan pemahaman yang lebih baik dari 13egati asing terhadap Tiongkok.

Dalam konteks diplomasi budaya, *broadcasting* dapat diartikan upaya suatu negara menyebarkan informasi serta ide mengenai negara tersebut di depan 13egati asing melalui siaran 13egative, radio, film, dan berita dengan tujuan menciptakan opini positif.

1.6 Argumen Utama

Penulis memberikan 13egative pada penelitian ini bahwa untuk menciptakan citra positif dan daya 13egat masyarakat ASEAN, Tiongkok meningkatkan soft powernya dengan menggunakan strategi diplomasi budaya. Melalui pendidikan, pada tahun 2008 Tiongkok membentuk pekan festival pendidikan tahunan yang mewadahi kerjasama antar universitas-universitas Tiongkok dan ASEAN guna mendorong mahasiswa melakukan pertukaran pelajar dan menempuh pendidikan di universitas masing-masing yang dinamakan *China-ASEAN Education Exchange Week*. Pekan festival pendidikan ini merupakan strategi Tiongkok yang bertujuan meningkatkan minat mahasiswa negara-negara ASEAN untuk melakukan pertukaran mahasiswa, penelitian bersama, dan melanjutkan studinya di universitas-universitas Tiongkok.

Melalui *language teaching*, pada tahun 2005, Tiongkok mulai mendirikan lembaga Bahasa mandarin yang bernama Confucius Institute di universitas yang ada di negara-negara ASEAN guna memfasilitasi masyarakat ASEAN belajar Bahasa mandarin serta nilai dan kebudayaan Tiongkok agar tercipta minat masyarakat ASEAN terhadap nilai-nilai kebudayaan Tiongkok melalui pembelajaran Bahasa mandarin.

Melalui *broadcasting*,

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif sendiri mulai digunakan pada tahun 1960-an yang didominasi oleh penelitian dalam bidang psikologi sosial, ilmu politik, ilmu sosiologi, dan

ilmu-ilmu sosial lainnya (Hammersley, 2013). Mengutip buku M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur kuantitatif atau dengan cara-cara kuantifikasi (Ghani & Almansyur, 2012). Buku ini menjelaskan bahwa pada penelitian kualitatif deskriptif, peneliti akan mengembangkan rumusan masalah yang berkaitan dengan penjelasan tentang bagaimana fenomena sosial bisa terjadi, siapa yang terlibat dalam fenomena tersebut, maupun tempat dan waktu terjadinya fenomena. Para peneliti yang menggunakan metode kualitatif, umumnya melakukan analisis melalui kata-kata dan interpretasi dibanding menggunakan data numerik. Data yang seringkali digunakan oleh para peneliti kualitatif adalah situs berita yang kredibel, laporan resmi baik dari organisasi pemerintah maupun *non-government organization* (NGO), dan studi kasus atau jurnal penelitian terdahulu. Berdasarkan penjelasan metode kualitatif deskriptif dari beberapa ahli yang telah dikutip, penulis ingin menjelaskan bagaimana upaya diplomasi budaya yang dilakukan Tiongkok terhadap ASEAN pada tahun 2002-2012

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penulis akan memberikan jangkauan penelitian agar pembahasan penelitian ini tetap sejalan dengan rumusan masalah yang diajukan, maka batasan waktu penelitian ditetapkan dengan jangkauan waktu tahun 2002-2012 dimana pada periode ini menunjukkan kepemimpinan Hu Jintao memperkenalkan dua pilar kebijakannya yakni "*Peaceful Development*" dan "*Harmonious World*" pada awal kepemimpinannya yang mendorong Tiongkok melakukan upaya diplomasi budaya dalam skala besar. Pada periode ini juga tepatnya tahun 2005, Tiongkok secara resmi menjalin hubungan kerjasama budaya dengan ASEAN dan berlanjut hingga kepemimpinan Hu Jintao selesai pada tahun 2012.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan data-data guna mendukung penelitian utama mengenai permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode studi pustaka dimana metode ini mengumpulkan data yang berasal dari sumber penelitian yang sudah lebih dulu diteliti oleh peneliti sebelumnya. Bentuk data dari metode studi pustaka

berupa jurnal-jurnal terdahulu, artikel berita dari situs berita internasional dan kredibel, laporan resmi pemerintah suatu negara, *ebook*, dan laporan dari organisasi internasional resmi.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Selain mengumpulkan data, pada penelitian ini dibutuhkan juga teknik analisis data guna membantu penulis dalam menganalisis kumpulan data yang didapatkan dari sumber maupun penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dimana ahli ternama Fossey, cs., (2002) mengartikan analisis data kualitatif adalah proses mereviu dan memeriksa data, serta menyintesis dan menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti (Fossey, cs., 2002). Dalam kerangka kerja analisis data ini, terdapat empat komponen utama, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*verifying conclusions*) (Sugiyono, 2013).

1.7.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi menjadi 4 bab dengan masing-masing bab memiliki isi dan pembahasan yang berbeda-beda.

Bab I: penulis akan menjelaskan gambaran umum mengenai masalah yang diteliti serta penjelasan mekanisme penelitian dan penulisan secara detail.

Bab II: penulis akan menjelaskan upaya diplomasi budaya yang dilakukan Tiongkok terhadap ASEAN melalui 15egative1515 pendidikan.

Bab III: penulis akan menjelaskan upaya diplomasi budaya yang dilakukan Tiongkok terhadap ASEAN melalui 15egative1515 *language teaching* dan *broadcasting*.

Bab IV: penulis akan menuliskan kesimpulan, kritik, dan saran serta penutup dari keseluruhan penelitian terutama jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat.

